

## MENJAGA AKSES PENDIDIKAN YANG ADIL: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Aprilliantoni<sup>1\*</sup>, Farhan Ali Jimale<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam 45

\*Email: [aprilliantoni@unismabekasi.ac.id](mailto:aprilliantoni@unismabekasi.ac.id)

<sup>2</sup>Liberty Tax Canada

Email: [farhan@warsanfinancial.com](mailto:farhan@warsanfinancial.com)

### ABSTRAK

Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia yang berbudaya dan demokratis. Namun, biaya pendidikan yang semakin tinggi membuat akses pendidikan menjadi sulit bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting dalam menyediakan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Kebijakan Inklusi Pendanaan pendidikan yang berkeadilan dengan lama tahun pendidikan dan punya relasi dengan kesejahteraan rakyat. Dimana terjadinya gaya tarik menarik antara dua kutub tersebut. Penelitian terdahulu hanya membandingkan tingkat penambahan tahun pendidikan dengan kemiskinan tingkat lintas negara.

Metode penelitian ini mengeksplorasi data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka (library research) yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku literatur relevan dan data sekunder yang diperoleh dan diolah dari data BPS dan Bank dunia. Dan ada 27 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvei.

Kesimpulan Makalah ini adalah Kebijakan Inklusi Pendanaan pendidikan akan mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Karena setiap pertumbuhan ekonomi akan menciptakan tambahan pekerjaan. Merujuk Konsep hukum Tarik Menarik Newton di mana ada gaya tarik yang kuat antara pembiayaan pendidikan yang adil (*pro fund*), dengan penambahan tahun pendidikan (*pro education*), Maka antara dua masa akan mempunyai gaya tarik menarik antara satu benda dengan benda lain dan bila jaraknya makin dekat, maka semakin besar gaya tarik menariknya, sehingga menghasilkan gaya dorong kesejahteraan rakyat.

**Keyword:** *pembiayaan pendidikan yang adil (pro fund), lama tahun pendidikan (pro education), gaya dorong kesejahteraan*

### ABSTRACT

*Education is a basic right for every individual to develop his potential as a cultured and democratic human being. However, the higher cost of education makes access to education more difficult for people in the middle and lower economic classes. Therefore, education financing is very important in providing a fair opportunity for every individual to get a quality education.*

*The purpose of this research is to find out the Education Funding Inclusion Policy that is equitable with the length of years of education and has a relationship with people's welfare. Where is the force of attraction between the two poles. Previous*

*research only compared the rate of additional years of education with poverty across countries.*

*This research method explores secondary data collected through library research which is carried out by searching relevant literature books and secondary data obtained and processed from BPS and World Bank data. And there are 27 districts/cities in Indonesia that were surveyed.*

*The conclusion of this paper is that the Education Funding Inclusion Policy will encourage economic growth and people's welfare. Because every economic growth will create additional jobs. Referring to the concept of Newton's Law of Attraction where there is a strong attraction between fair education funding (pro-fund), with the addition of years of education (pro-education), then between two periods there will be an attractive force of attraction between one object and another and if the distance the closer it is, the greater the force of attraction, thus producing a driving force for people's welfare*

**Keyword:** *fair education financing (pro fund), length of years of education (pro education), welfare driving force*

## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendidikan di Indonesia masih terkendala oleh masalah pembiayaan yang tidak merata, mengakibatkan terjadinya jurang antara yang mampu dan yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang berkualitas. Artikel ini membahas tentang meluasnya jurang pembiayaan pendidikan di Indonesia beserta dengan tantangan dan solusinya.

Adapun pendidikan menjadi sangat penting dan menjadi hak setiap individu. Pendidikan juga menjadi faktor penentu dalam kesuksesan seseorang. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena adanya permasalahan pembiayaan pendidikan. Permasalahan ini terjadi tidak hanya di sekolah swasta namun juga di sekolah negeri.

Sedangkan pembiayaan pendidikan merupakan sumber dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pembiayaan pendidikan sangat penting untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam konteks sekolah swasta merupakan opsi bagi masyarakat dalam memilih pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Sayangnya, biaya yang diperlukan untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta biasanya jauh lebih mahal daripada di sekolah negeri. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya operasional, gaji guru, serta perawatan fasilitas yang lebih baik.

Di sisi lain, meskipun dianggap sebagai jawaban atas masalah pembiayaan pendidikan, sekolah negeri juga mempunyai masalah dalam pembiayaan. Meskipun tidak terlalu mahal, namun biaya pendidikan di sekolah negeri tidak sepenuhnya gratis. Meskipun terdapat banyak program bantuan sosial dari pemerintah, namun masih banyak biaya yang harus ditanggung oleh orang tua seperti uang pangkal, buku, seragam, dan lain-lain.

Permasalahan pembiayaan pendidikan ini tidak hanya menjadi beban bagi orang tua mahasiswa, namun juga menjadi beban bagi pemerintah. Pemerintah banyak memberikan program bantuan untuk mereka yang tidak mampu

membayar biaya pendidikan. Sayangnya, program bantuan ini masih belum merata dan tidak semua pelajar mendapatkannya. Karena adanya perbedaan standar pendidikan di antara sekolah negeri dan swasta, maka program bantuan pun dibedakan antara keduanya.

Masalah ini tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Siswa-siswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya mendapat pendidikan layak. Sedangkan untuk sekolah yang mengalami keterbatasan biaya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Karena pendidikan adalah hak dan kebutuhan dasar, maka harus ada solusi dan langkah tegas dalam menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan ini.

Pendidikan adalah investasi yang penting bagi masa depan masyarakat dan negara. Karena itu, permasalahan pembiayaan pendidikan harus dicarikan solusi yang tepat dan berkelanjutan agar semua orang dapat mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tidak boleh ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena tidak sanggup membayar biaya pendidikannya, atau sekolah-sekolah yang menjadi tempat kurang berkembang karena tidak mampu memperoleh biaya (Sari, V. A. and Tiwari, S. Forthcoming, 2020).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Gaya Tarik Menarik

Hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. Dalam bidang fisika tiap benda dengan massa  $m_1$  selalu mempunyai gaya tarik menarik dengan benda lain (dengan massa  $m_2$ ). Misalnya partikel satu dengan partikel lain selalu akan saling tarik-menarik.

Contoh yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton dalam bidang mekanika klasik bahwa benda apapun di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi, yang kemudian banyak dikenal sebagai fenomena benda jatuh. Gaya tarik menarik gravitasi ini dinyatakan oleh Isaac Newton melalui tulisannya di *Journal Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* pada tanggal 5 Juli 1687 dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

- $F$  = besarnya gaya gravitasi antara dua massa tersebut,
- $G$  = [konstanta gravitasi](#),
- $m_1$  = massa dari benda pertama
- $m_2$  = massa dari benda kedua, dan
- $r$  = jarak antara dua massa tersebut.

Teori ini kemudian diteorikan lebih jauh lagi bahwa satu benda angkasa akan saling tarik-menarik dan ini dapat dijelaskan mengapa bumi harus berputar mengelilingi matahari untuk mengimbangi gaya tarik-menarik gravitasi bumi-matahari. Dengan menggunakan fenomena tarik menarik gravitasi ini juga, meteor yang mendekat ke bumi dalam perjalanannya di ruang angkasa akan tertarik jatuh ke bumi.

Disini diasumsikan  $m_1$  adalah pembiayaan pendidikan yang adil (*pro fund*), sedangkan  $m_2$  adalah penambahan tahun pendidikan (*pro education*), Maka antara dua masa yakni ( $m_1$ ) dan ( $m_2$ ), akan mempunyai gaya tarik menarik antara satu benda dengan benda lain dan bila jaraknya makin dekat, maka semakin besar gaya tarik menariknya, disini sebagai berbanding terbalik kuadrat kuadrat jarak.

Dengan konsep teori ini bisa diterangkan bahwa akan dihasilkan gaya dorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dengan Pembiayaan Pendidikan yang adil dan penambahan tahun pendidikan

### 3. METODE

Studi paper ini merupakan hal baru, terutama topik tentang tinjauan Kebijakan Inklusi Pendanaan pendidikan yang berkeadilan dengan lama tahun pendidikan dan punya relasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan terjadinya gaya tarik menarik antara dua kutub tersebut. Penelitian terdahulu hanya membandingkan tingkat penambahan tahun pendidikan dengan kemiskinan tingkat lintas negara.

Penelitian ini mengeksplorasi data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku literatur relevan dan data sekunder yang diperoleh dan diolah dari data BPS dan Bank Dunia. , Dan ada 27 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvei, Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta dan luas terdiri dari hampir 2 juta km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki tingkat variasi yang tinggi dalam beberapa indikator sosial ekonomi lintas kabupaten/kota (kabupaten/kota).

### 4. HASIL PEMBAHASAN

#### 4.1 Isi Hasil dan Pembahasan

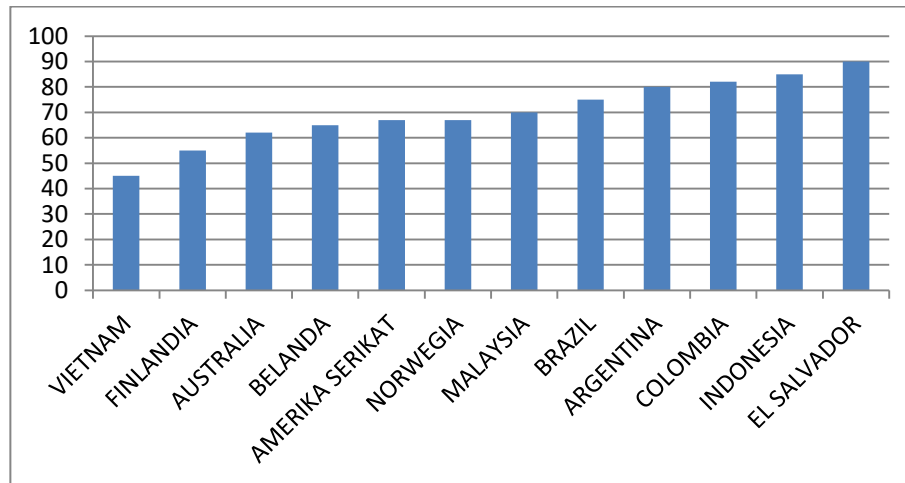
##### Indikator Sosial Ekonomi Kota/ Kabupaten

Tingkat Kemiskinan Rata2 12 %		Tahun Pendidikan Rata2 8,68 thn		Jumlah Populasi Rata2 514,754		Penduduk usia Sekolah Rata2 128,565	
<i>Paling Rendah</i>	<b>Kota Tangerang Selatan (2%)</b>	<i>Paling Rendah</i>	<b>Kabupaten Asmat (5,58)</b>	<i>Paling Rendah</i>	<b>Kabupaten Tambrauw (13,750)</b>	<i>Paling Rendah</i>	<b>Kabupaten Tambrauw (4,488)</b>
<i>Paling Tinggi</i>	<b>Kab Deiyai (44%)</b>	<i>Paling Tinggi</i>	<b>Kota Banda Aceh (12,03)</b>	<i>Paling Tinggi</i>	<b>Kabupaten Bogor (5.682,871)</b>	<i>Paling Tinggi</i>	<b>Kabupaten Bogor (1,542,025)</b>

2. Sumber : diolah dari BPS

Dari Tabel diatas, dengan populasi lebih dari 270 juta dan terdiri dari hampir 2 juta km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki tingkat variasi yang tinggi dalam beberapa indikator sosial ekonomi lintas kabupaten/kota (kabupaten/kota). Misalnya, kabupaten terkecil di Indonesia Kabupaten Tambrauw berpenduduk kurang dari 15.000, sedangkan kabupaten terbesar di Indonesia, Kab. Bogor, memiliki jumlah penduduk 5,6 juta. Selanjutnya, tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan yang paling rendah adalah 2 persen, Kab. Deiyai memiliki tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan yakni 44 persen (World Bank, Revealing, 2020).

**Gambar Porsi Anggaran Pendidikan yang Dihabiskan Untuk Gaji Guru, Negara-Negara Dunia**



Sumber : Bank Dunia

Dari grafik diatas pengeluaran Indonesia untuk gaji guru relatif tinggi terhadap negara lain. Menggunakan data tahun 2010, porsi rata-rata belanja gaji menurut kabupaten/kota pada saat itu diperkirakan sekitar 67 persen (Bank Dunia 2013). Proporsi ini meningkat menjadi 78 persen jika dihitung menggunakan laporan pengeluaran pendidikan kabupaten/kota.

Peningkatan bahkan lebih tinggi jika menggunakan estimasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan (86 persen). Namun demikian, Gambar diatas menunjukkan bahwa pengeluaran Indonesia lebih tinggi proporsi anggarannya untuk gaji guru dibanding banyak sistem pendidikan Negara lain yang berkinerja tinggi, seperti Finlandia, Norwegia, Belanda, dan Amerika Serikat (World Bank, Revealing, 2020). Indonesia juga membelanjakan lebih banyak dari negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, dan setara dengan Argentina dan Kolombia.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kabupaten/kota dan provinsi pada sumber daya yang dialokasikan untuk pembayaran gaji. Di antara provinsi, 4 dari 34 provinsi mengalokasikan antara 70 dan 80 persen dari anggaran mereka untuk pengeluaran terkait gaji. Untuk kabupaten dan kota, 77 persen kabupaten/kota mengalokasikan lebih dari 70 persen dari anggaran mereka untuk pembayaran pengeluaran terkait gaji. Dalam kasus ekstrim, ada 32 kabupaten/kota menghabiskan lebih dari 90 persen dari anggaran mereka untuk gaji.

Analisis realisasi anggaran menegaskan pentingnya gaji dalam anggaran kabupaten/kota. Analisis data dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran tertinggi menurut program adalah pembayaran “gaji dan tunjangan guru” sebesar 86 persen, diikuti oleh “dukungan lain untuk pembelajaran” (5 persen), infrastruktur (5 persen), biaya operasional (3 persen), dan pelatihan guru (1 persen). Kabupaten dengan porsi anggaran tertinggi yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru adalah Kab. Sragen (96 persen), sedangkan kabupaten dengan pangsa terendah adalah kota besar seperti Kota Surabaya (45 persen).

Kota-kota besar menerapkan lebih banyak program pendidikan yang tidak terkait dengan gaji, seperti pelatihan guru dan program pendukung pembelajaran lainnya (yaitu, hibah operasional sekolah lokal, program beasiswa). Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, porsi anggaran yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru mencakup sebagian besar sumber daya pendidikan di semua kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota

memiliki sisa sumber daya yang sangat terbatas untuk melaksanakan program pendidikan nongaji yang dapat difokuskan untuk peningkatan mutu.

Pengangkatan, dan pengelolaan guru PNS semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU No. 5/2014 mendefinisikan dua jenis status untuk PNS, termasuk guru: (i) PNS yang dipekerjakan secara tetap (Pegawai Negeri Sipil, PNS) yang menerima paket tunjangan ketenagakerjaan terkait, dan yang berhak untuk mengakses layanan profesional berkelanjutan peluang pengembangan; dan (ii) seorang pegawai negeri yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jangka waktu tetap (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK), yang menerima paket tunjangan kerja terkait. Jenis PNS “kontrak” ini juga berhak untuk mengakses kesempatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan lainnya juga dapat dilakukan di tingkat sekolah dengan menggunakan BOS atau dana lain yang dihasilkan sekolah seperti iuran orang tua seperti SPP untuk sekolah swasta.. Tidak ada standar seragam untuk perekrutan dengan cara ini, karena keputusan dibuat oleh masing-masing sekolah. Oleh karena itu, kualitas pengajar honorer sangat bervariasi. Gaji guru honorer jauh lebih rendah dari upah minimum regional (UMR), kurang dari seperlima dari gaji guru PNS bersertifikat (Bank Dunia), dan sangat bergantung pada kemampuan keuangan sekolah. Dan disinilah letak ketimpangan sekolah Negeri dan sekolah swasta, dimana sekolah swasta harus membayar gaji guru yang bersumber dari SPP yang sangat terbatas, sehingga gajinya kadang jauh dari UMR sedangkan guru sekolah Negeri dibiayai dari anggaran Pendidikan yang sangat besar, sehingga mereka mendapat gaji dan tunjangan yang jauh diatas UMR. Pada 77 persen kabupaten/kota mengalokasikan lebih dari 70 persen dari anggaran Pendidikan mereka untuk pembayaran pengeluaran terkait gaji. Dalam kasus ekstrim, ada 32 kabupaten/kota menghabiskan lebih dari 90 persen dari anggaran Pendidikan mereka untuk gaji BAPPENAS. (2019).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, masih terdapat masalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain kurangnya anggaran pendidikan yang dianggap masih rendah serta perbedaan kualitas pendidikan antara daerah yang memerlukan pembiayaan tambahan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan dengan menambah anggaran yang cukup, distribusi yang lebih merata dan pemerataan kualitas pendidikan.

Meluasnya jurang pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Meski pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, namun upaya tersebut masih terkendala oleh ketimpangan pembiayaan. Akibatnya, kualitas pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat masih sangat bervariasi, tergantung pada kemampuan finansial masing-masing individu.

Beberapa tantangan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah masih terdapatnya masalah dalam alokasi anggaran pendidikan serta pengawasan yang belum optimal, belum meratanya lokasi dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, solusinya antara lain adalah perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dengan baik, mendorong pendidikan inklusif dan merata baik sekolah negeri maupun swasta, serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mengelola pendidikan. Pemerintah juga perlu mendorong adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas akses pendidikan.

Solusi pertama adalah pemerintah perlu memberikan program bantuan kepada semua siswa tanpa terkecuali dan memperluas program tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas sekolah swasta yang tertinggal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih baik.

Solusi kedua adalah dengan mendorong pihak swasta, khususnya yang bergerak di sektor pendidikan, untuk lebih memprioritaskan program keberlanjutan bagi siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengalokasikan sebagian dari keuntungan mereka untuk pengembangan program bantuan bagi siswa miskin.

## 5. KESIMPULAN

Meluasnya jurang pembiayaan pendidikan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan internasional. Diperlukan solusi yang menghasilkan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk masyarakat Indonesia.

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia. Berbagai upaya dan inovasi dalam pembiayaan pendidikan perlu dilakukan oleh pemerintah agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, terutama untuk masyarakat di pedalaman dan daerah yang tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pembiayaan pendidikan dan perlu meningkatkan anggaran pendidikan serta mempercepat distribusi dana ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Menambah jumlah tahun pendidikan berarti membuat seseorang menjadi produktif dan punya daya saing, Demikian pula Pembiayaan Pendidikan yang adil berarti seseorang mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, sehingga bisa meningkatkan pendapatan pelaku lebih produktif dan memberikan kontribusi nilai tambah Kesejahteraan.

Sehinga program pro pembiayaan pendidikan yang adil akan mempunyai gaya tarik menarik terhadap penambahan tahun pendidikan, Maka antara dua masa yakni ( $m^1$ ) dan ( $m^2$ ), akan mempunyai gaya tarik menarik antara satu benda dengan benda lain dan bila jaraknya makin dekat, maka semakin besar gaya tarik menariknya, disini sebagai berbanding terbalik kuadrat kuadrat jarak. Dengan konsep teori ini bisa diterangkan bahwa akan dihasilkan gaya dorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. 2017. *Education Sector Assessment: Indonesia*. Asian Development Bank.

- Al-Samarrai, S. 2013. “*Local Governance and Education Performance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts.*” World Bank, Jakarta, Indonesia.
- Al-Samarrai, Samer; Fasih, Tazeen; Hasan, Amer; Syukriyah, Daim. 2014. *Assessing the role of the school operational grant program (BOS) in improving education outcomes in Indonesia (English)*. Jakarta, Indonesia: World Bank Group.
- Bachtiar, I. 2019. The Challenge of Education Financing in Indonesia: A Literature Review. *Journal of Education and Human Development*, 8(2), 123-130.
- BAPPENAS. 2019. *Indonesia SDGs Progress Report 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bruns, B., D. Filmer, and H. A. Patrinos. 2011. *Making Schools Work: New Evidence on Accountability Reforms*. Washington, DC: World Bank.
- Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. 2014. *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. World Bank. Washington, DC.
- de Ree, J., K. Muralidharan, M. Pradhan, and H. Rogers. 2017. “*Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia.*” Policy Research Working Paper 8264, World Bank, Washington, DC.
- Gaduh, A., Pradhan, M., Priebe, J., and Susanti, D. 2020. “*Scores, Camera, Action? Incentivizing Teachers in Remote Areas.*” RISE Working Paper Series. 20/035. [https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP\\_2020/035](https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2020/035).
- Hanushek. 2003. The failure of input-based policies. *The Economic Journal*. 113 (February), F64-F98 INOVASI. 2017. A case study of a teachers’ cluster working group in Moyo Hulu, Sumbawa. INOVASI.
- Kesuma, R., Utz, A., Bodrogini, P., Purwana, R. 2018. *Efficient Deployment of Teacher: A Policy Note*. World Bank.
- Lewis, B. and Smoke, P. 2017. *Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia*. Fiscal Studies, 38(1), pp.111-139.
- Lewis, B. Forthcoming. *Indonesia fiscal transfer chapter that has been prepared for the global study on decentralized education financing systems*.
- Ministry of Education and Culture. 2019. *Indonesia Education Statistics 2018/2019*. Ministry of Education and Culture.
- Nabil, N. (2020). Dinamika Guru Dalam Menghadapi Media Pembelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Almarhalah/ Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 51-62.
- Pramono, R. 2021. *Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Rahmawati & Asriyanti, 2016. *Integrity Index of National Exam: An Effort to Gain Precise Information on Achievement of Curriculum Standards*, Paper presented at IAEA.
- Rosser, A., Fahmi. M. 2016. *The Political Economy of Teacher Management in Decentralized Indonesia*. Working Paper in Economics and Development Studies. University of Padjajaran.



Sari, V. A. and Tiwari, S. *Forthcoming. The Geography of Human Capital: Insights from the Sub-national Human Capital Index in Indonesia*. Jakarta: The World Bank

World Bank. 2014. *Sudan – State-level Public Expenditure Review; Meeting the Challenges of Poverty Reduction and Basic Service Delivery*. Synthesis Report – Summary for Policy Makers.

World Bank. Washington DC. World Bank. 2013. *Spending more or spending better: Improving education financing in Indonesia*. World Bank. Washington DC.